View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Digital Library of UIN Sunan Ampel

PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Nur Kholis
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pengantar

Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki kepentingan melalui pendidikan (politik pendidikan). Melalui pendidikan negara akan diuntungkan dari sisi pelestarian budaya dan politik nasional, ketersediaan tenaga kerja secara nasional, pencerdasan bangsa secara nasional, dan stabilitas bangsa secara nasional pula. Barangkali aspek-aspek politis ini yang menyebabkan pendidikan kita ditangani secara sentral. Melalui kurikulum nasional cita-cita bangsa dan negara ini tercapai. Apakah cita-cita bangsa secara nasional ini sudah tidak penting lagi sehingga perlu ada desentralisasi pendidikan? Lalu tidak mungkinkan melestarikan cita-cita nasional ini melalui desentraliasi pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu banyak jawabnya.

Akhir-akhir ini isu desentralisasi pendidikan telah menjadi agenda publik. Munculnya isu ini disemangati oleh isu otonomi daerah tingkat I dan tingkat II, yang undang-undangnya baru saja disahkan. Inti dari desentralisasi adalah diserahkannya sejumlah aset nasional untuk dikelola dan dikembangkan oleh daerah tingkat I dan tingkat II. Sehingga hanya tinggal lima bidang yang tetap diurus secara nasional, yaitu hukum, keamanan, keuangan, agama, dan hubungan luar negeri. Salah satu aset yang diserahkan ke daerah adalah urusan pendidikan. Diserahkannya pendidikan ke daerah ini kemudian memunculkan harapan dan kecemasan di pihak pelaku pendidikan. Di satu sisi, dengan desentralisasi lembaga pendidikan akan lebih bebas mengembangkan apa yang dimaui dan dianggap baik, dan di sisi lain, banyak yang tidak siap melakukan upaya untuk itu. Tapi yang jelas, siap tidak siap, lembaga pendidikan harus melakukan reposisi-reposisi dan reorientasi untuk menyikapi desentralisasi ini. Salah satu aspek penting yang harus diadakan reorientasi dan restrukturisasi adalah aspek kurikulum.

Reoriantasi kurikulum dimaksudkan untuk menjawab berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat abad 21 ini; antara lain munculnya derversifikasi kebutuhan masyakat yang semakin kompleks dan tuntutan masyarakat akan kualitas lulusan pendidikan. Pendidikan melalui kurikulumnya diharapkan dapat memenuhi tuntutan ini. Tulisan singkat ini mencoba menawarkan pola pengembangan kurikulum dalam situasi desentralis.

Sekilas Desentralisasi Pendidikan

Konsep ‘desentralisasi’ dalam praktek pendidikan di Indnesia dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama desentralisasi struktural, yaitu pemerintah pusat menyerahkan segala wewenang pengurusan pendidikan kepada pemerintah

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat propinsi dan kabupaten. Pada model desentralisasi ini pemerintah daerah akan berperan sebagaimana pemerintah pusat berperan pada pendidikan seperti sekarang ini. Hanya saja jalur komunikasinya lebih pendek ketimbang dipusatkan.

Kedua desentralisasi menajerial, yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan kepada sekolah. Pemerintah pusat maupun daerah tidak ikut campur dalam pengelolaan sekolah, dan hanya individu-individu sekolah bersama-sama komunitas pendukung yang bisa mengembangkannya. Tingkat kedua ini kemudian memunculkan konsep manajemen berbasis-sekolah atau *school-based management*.

Desentralisasi sampai tingkat sekolah berusaha memberikan konstituens sekolah –administrator, guru, orang tua, dan anggota kemunitas lainnya— kekuasaan lebih atas apa yang terjadi di sekolah. Dengan melihat arus perubahan masa dan tuntutan independensi masyarakat nampaknya manajemen berbasis-sekolah ini yang lebih disenangi, dimana individu-individu sekolah diberi kebebasan mengembangkan sekolahnya sendiri sesuai kekuatan dan kekurangan masing-masing.

Apa yang didesentralisasikan masih menimbulkan perdebatan. *Pertama*, pemerintah memberikan semua biaya operasionalisasi sekolah termasuk penyediaan fasilitas dan SDMnya, tapi manajemen dan pengembangan programnya diserahkan kepada masing-masing sekolah? Dalam hal ini desentralisasi bermakna *academic decentralization* secara luas. Artinya pemerintah tidak perlu menyediakan 'petunjuk' operasionalisasi sekolah dan kurikulum yang akan diterapkan. Apa yang akan ditawarkan sekolah kepada masyarakat dan bagaimana cara menawarkannya *is none of government business*. Kalau ini yang dipilih maka akan muncul berbagai sistem sekolah dengan gayanya sendiri-sendiri. Dan kalau ini benar maka akan muncul persoalan bagaimana sekolah memberikan jaminan mutu akademik, karena setiap sekolah memiliki ciri masing-masing? Haruskah ada evaluasi tahab akhir bersama? Bagaimana pertanggungjawaban keuangannya? Punya hakkah pemerintah melakukan akreditasi sekolah? Kalau pemerintah tidak punya hak siapa yang akan melakukan *quality control* terhadap sekolah? Model ini nampaknya belum terjadi dalam sistem pendidikan kita.

Kedua, pemerintah hanya memberikan kurikulum nasional dan sebagian dana untuk mendukung implementasinya, sementara sekolah dibebaskan mengembangkan manajemen dan kurikulum lokalnya beserta pendanaan yang mengikutinya? Dalam hal ini terjadi *joint-decentralization*, pemerintah dan sekolah sama-sama memiliki saham dalam operasionalisasi pendidikan. Kalau ini yang diambil, maka akan ada *dual-power* yang mengontrol pelaksanaan pendidikan. Pemerintah berkepentingan mengontrol standard akademik nasional (mis., Ebtanas) dan sekolah berkepentingan mengontrol standar program lokalnya. Nampaknya, dalam kadar tertentu, pola ini terjadi pada sebagian

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah negeri dan swasta sekarang ini. Model ini yang paling kuat mengontrol tetap pemerintah. Buktinya masih diberlakukannya sistem akreditasi secara nasional. Ijazah akhir yang diakui tetap ijazah yang bertarap nasional, berupa hasil Ebtanas.

Ketiga, pemerintah hanya menguasai bidang program dan akademik. Artinya program pendidikan tidak boleh menyimpang dari garis-garis yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi dari segi operasionalisasinya termasuk fasilitas dan SDMnya masing-masing sekolah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini terjadi *management decentralization*. Sekolah murni sebagai pelaksana pendidikan, tidak punya kekuatan untuk memprogram pendidikannya sendiri. Kalau ini yang diikuti maka yang berhak mengontrol kualitas akademiknya adalah pemerintah, sementara sekolah tidak bisa berbuat banyak. Model ini juga menyebabkan ijazah lokal tidak diakui oleh pemerintah bahkan masyarakat. Model ini berlaku bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak mendapat subsidi pemerintah sama sekali. Kebanyakan madrasah beroperasi melalui model desentralisasi ini.

Keempat, setiap sekolah wajib mencari dukungan operasionalisasi sendiri termasuk pengembangan program pendidikannya. Pemerintah tidak ikut campur dalam segala urusan operasionalisasi sekolah. Dalam hal ini terjadi *full-decentralization*. Kalau ini terjadi akan muncul bermacam-macam sistem sekolah beserta keragaman program pendidikannya. Dalam satu Kecamatan, misalnya, dua sekolah bisa berbeda segala-galanya. Barangkali ini model *school-based development* yang sebenarnya. Lalu siapa yang memberikan jaminan kualitasnya? Masing-masing sekolah itu. Apa yang ditawarkan dan cara mempertahankan kualitasnya sangat tergantung pada kemampuan sekolah untuk melakukannya. Sementara yang menilai mutu tidaknya program pendidikan yang ditawarkan adalah masyarakat secara langsung. Kalau dirasa lulusannya tidak mutu masyarakat tidak akan memasukkan putra-putrinya. Model ini terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan pesantren tradisional bahkan pesantren moderen. Seringkali pesantren tidak ambil pusing apakah pendidikannya diakui oleh pemerintah atau tidak, yang penting masyarakat masing mempercayainya. Kalau model ini diadopsi dalam sistem sekolah maka akan terjadi kompetisi akademik secara maksimal, karena hanya dengan kualitas pendidikan masyarakat akan tetap setia mendukungnya.

Empat model yang dipaparkan di atas dapat dipakai untuk memahami sampai dimana tingkat desentralisasi pendidikan dan memilah mana yang dapat diterapkan dalam kerangka desentralisasi pendidikan di Indonesia. Semua model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penerapan salah satu model harus melalui berbagai uji kritis, analitis, politis, ekonomis, dan educational, sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang diharapkan.

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan Desentralisasi Pendidikan dengan Kurikulum

Terlepas dari agenda politik nasional yang menggalakkan otonomi daerah, munculnya desentralisasi pendidikan sampai ke tingkat sekolah (*school-based management*) dapat dilacak dari temuan-temuan penelitian tentang sekolah yang efektif. Munculnya desentralisasi sekolah ini berdasarkan asumsi adanya hubungan positif antara desentralisasi sekolah dengan kualitas program pendidikannya (kurikulumnya). Jika statemen ini dibalik, maka akan berbunyi bahwa program pendidikan atau kurikulum akan berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat jika terjadi desentralisasi pendidikan sampai tingkat sekolah. Beberapa studi tentang efektifitas sekolah menemukan bahwa peningkatan kualitas belajar siswa terjadi pada sekolah-sekolah yang relatif otonom, memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalannya sendiri dan kepemimpinan yang kuat. Dengan otonomi, sekolah dapat mengatur sumber-sumber untuk mendukung implementasi kurikulum demi kepentingan siswa.

Ciri dari *school-based management* yang ditengarai memiliki dampak pada kualitas kurikulum, dus menghasilkan lulusan yang berkualitas mencakup lima hal, yaitu:

1. Otonomi, fleksibilitas dan responsifitas
2. Perencanaan oleh kepala sekolah dan komunitas sekolah
3. Lingkungan sekolah bergaya partisipatoris
4. Kolaborasi dan kolegialitas diantara staf (guru)
5. Meningkatnya rasa memiliki bagi kepala sekolah dan guru-guru.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa kinerja sekolah akan baik ketika lingkungan memberikannya otonomi secara luas dan sekolah sendiri merasa memiliki otonomi untuk mengembangkan program pendidikannya. Namun untuk menjadi otonomi luas nampaknya tidak mudah bagi sekolah kita, paling tidak sampai sekarang ini. Dengan otonomi luas sekolah dapat mencurahkan segala *resource* untuk kepentingan program pendidikan. Nampaknya sekolah-sekolah yang berkualitas (model, unggul, *excellent*) memang sudah merasakan dan mempraktekkan otonomi yang tinggi, meskipun masih mengikuti kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Fleksibilitas terkait dengan kemampuan untuk berubah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna sekolah. Dengan fleksibilitas dimungkinkan terjadinya inovasi-inovasi dalam program pendidikan dan penciptaan lingkungan yang mendukung program pendidikan motivasi kinerja guru. Dengan begitu maka kualitas belajar akan tercapai. Daya responsifitas juga menyebabkan peningkatan kualitas pendidikan, karena sekolah berusaha merespon perkembangan tuntutan dan kebutuhan pengguna pendidikan.

Dengan *school-based management* memungkinkan perencanaan program dibuat di sekolah oleh kepala dan sekolah dan kemungkinan mengarahkan sumber-sumber sekolah pada perencanaan yang ada. Dengan perencanaan sekolah maka sumber dapat dipusatkan pada penunjangan pengembangan profesi

---

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sumber-sumber belajar. Hal ini pada akhirnya akan mendongkarak hasil belajar siswa.

Keputusan-keputusan di sekolah dibuat secara partisipatoris antara kepala dan guru-guru yang ada. Keterlibatan guru dalam keputusan sekolah dapat membangkitkan semangat 'rasa' memiliki, kepercayaan, dan komitmen bagi guru pada program-program pendidikan yang meningkatkan pengembangan kurikulum dan keberhasilan pendidikan. Dengan dilibatkannya dalam keputusan kurikulum, guru merasa memiliki hasil keputusan itu dan mencoba untuk konsisten dengan keputusannya. Guru juga tidak merasa seperti 'tukang' mengajar saja. Konsistensi ini memungkinkan dilaksanakannya program pendidikan secara baik.

Dengan meningkatnya lingkungan partisipatif memungkinkan tingginya kolaborasi dan kolegialitas diantara guru. Dalam pendidikan kerjasama antara guru dalam proses pembelajaran sangat penting. Kerjasama guru dapat berupa perencanaan program pembelajaran bersama dan evaluasi bersama. Kerjasama juga memungkinkan tukar pikiran tentang persoalan-persoalan yang dihadapi pada masing-masing kelasnya. Maka kerjasama diantara guru berpotensi untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah.

Pengembangan Kurikulum dalam Era Desentralisasi

Setiap usaha untuk membenahi pendidikan termasuk kurikulum pendidikan adalah untuk membuat pendidikan lebih bermakna pada pengguna pendidikan, atau secara spesifik 'pembeli' kurikulum. Jelasnya dalam era desentralisasi ini kurikulum pendidiakn perlu dikembangkan agar sesuai dengan maksud dan arah desentralisasi pendidikan, seperti dipaparkan di atas. Pengembangan dilakukan untuk menentukan arah kurikulum ke depan yang lebih baik dengan mempertahankan arah kurikulum yang ada.

Bagaimana pengembangan kurikulum pada era desentralisasi pendidikan? Tergantung pada model desentralisasi yang diterapkan, kurikulum pendidikan harus dipola ulang. Inti dari desentralisasi pendidikan adalah diberikannya keleluasaan penuh atau parsial kepada daerah atau sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan komunitas sekolah tersebut. Sebenarnya dalam praktek selama ini, kurikulum nasional 1994 untuk sekolah dan 1995/1997/1999 untuk perguruan tinggi sudah memberikan peluang kepada masing-masing sekolah dan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum lokalnya. Dan ketika desentralisasi penuh diterapkan maka tidak menutup kemungkinan setiap sekolah dan perguruan tinggi diharuskan mengembangkan kurikulumnya sendiri-sendiri sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Konsideran pengembangan

Konsideran utama menejemen kurikum dalam desentralisai pendidikan adalah penekanannya pada hasil belajar siswa (*outcome*). Tanggungjawab dibebankan pada kepala sekolah dan guru-guru masing-masing sekolah,

---

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sumber yang tersedia secara efisien dan efektif, untuk menjamin hasil belajar siswa secara maksimal. Pencapaian hasil belajar siswa tergantung pada sekolah dalam memberikan kurikulum kepada setiap siswa.

Mengelola kurikulum yang berkualitas mencakup meningkatkan belajar siswa, meningkatkan kualitas pengajaran, dan penciptaan lingkungan yang mendukung belajar, dan struktur dan isi kurikulum yang tepat. Memenej kurikulum berbasis hasil belajar siswa digambarkan pada Gambar 1:

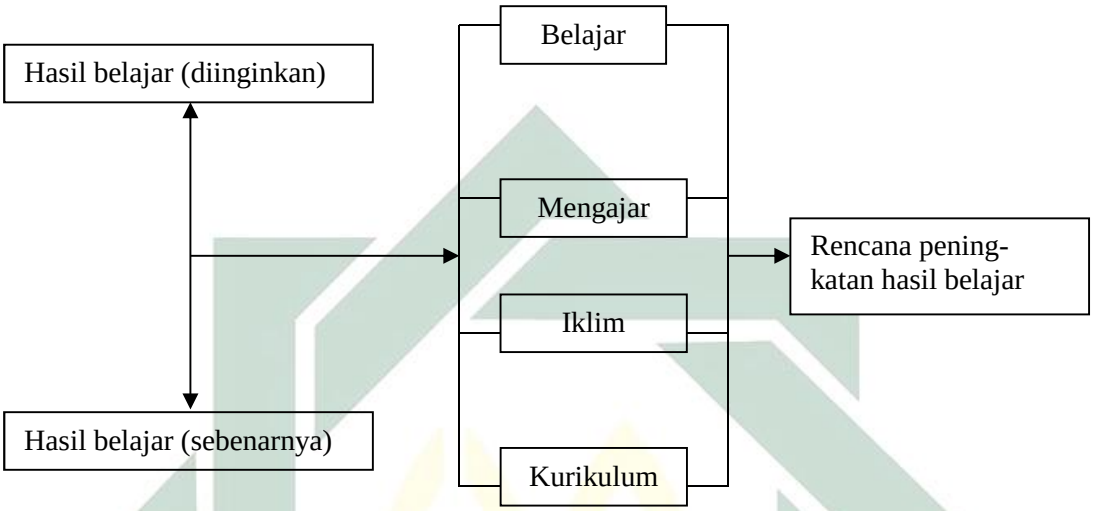

Gambar 1: Managemen kurikulum untuk meningkatkan hasil belajar siswa

Titik awal dari proses ini adalah keharusan sekolah memperhatikan kesenjangan antara tingkat keberhasilan yang diinginkan dan yang sebenarnya. Penilaian yang tepat memungkinkan sekolah mendongkarak pencapaian belajar yang ada pada segala usia dan kemampuan. Staf pengajar, dan komunitas sekolah secara umum, kemudian sepakat mencapai tingkat keberhasilan pada waktu yang ditentukan. Misalnya, akan ada peningkatan belajar 5% untuk semua siswa selama 2 tahun mendatang. Ini akan menjadi bagian dari rencana pengembangan sekolah. Apabila rencana ini dianggap penting maka semua komponen pendukung sekolah harus memedomani dan komitmen pada rencana itu.

Setelah itu perlu mengidentifikasi variabel utama yang mempengaruhi atau terkait dengan hasil belajar. Tugas dari mereka yang bertanggung jawab pada pengelolaan kurikulum adalah meningkatkan kualitas dan kinerja variabel itu. Gambar 1: mengidentifikasikan empat variabel penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa: belajar, mengajar, iklim sekolah, dan struktur dan isi kurikulum. Sekolah akan mencapai hasil belajar yang tinggi ketika terdapat fokus belajar oleh fihak pengajar dan siswa.

Mengajar sangat erat dengan belajar, keduanya merupakan aktifitas terpadu. Pendekatan mengajar harus didasarkan pada prinsip-prinsip belajar yang mapan. Mencapai hasil belajar siswa yang tinggi terjadi ketika semua guru mengamalkan prinsip-prinsip mengajar yang baik, apapun *background* personal mereka. Prinsip mengajar mencakup: menginformasikan tujuan belajar pada

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siswa, mengarahkan perhatian, memberi peluang *transfer* belajar, dan mengamati pencapaian serta memberikan *feedback*.

Budaya dan iklim sekolah mencakup nilai, harapan, dan kualitas hubungan antara guru dan siswa juga merupakan faktor pengaruh keberhasilan siswa dalam belajar. Salah satu indikator nilai adalah pengalokasian sumber cukup untuk pengembangan profesi.

Variabel terakhir adalah isi dan struktur kurikulum. Kurikulum yang berkualitas dapat dilihat dari kriteria berikut: kedalaman cakupan bidang, keseimbangan berdasar pertimbangan yang tepat, koordinasi dari tingkat bawah ke atas, relevansi dengan kebutuhan siswa, dan mampu menangkap perbedaan kemampuan siswa.

Isi kurikulum

Disamping tujuan utamanya adalah untuk mencapai keberhasilan siswa belajar, pengembangan isi kurikulum perlu mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang beragam pada masyarakat yang selalu berkembang. Cakupan kurikulum juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana sekolah itu beroperasi. Oleh karena itu diperlukan kurikulum fleksibel yaitu kurikulum yang dengan mudah diadaptasikan dengan kebutuhan masyarakat ketika terjadi. Pada tingkat sekolah menengah, misalnya, perubahan kurikulum tidak perlu menunggu sampai lima tahun. Paling tidak tiga tahun sudah bisa dirubah, ketika kondisi lingkungan memaksa harus berubah. Pada tingkat perguruan tinggi, kurikulum dapat dirubah dalam setiap semester.

Namun, untuk melakukan perubahan kurikulum ini diperlukan perencanaan secara serius melalui penelitian mendalam tentang kebutuhan pasar sehingga memungkinkan tidak terjadinya bongkar pasang kurikulum ditengah-tengah masa implementasi.

Pembuatan kurikulum

Sekolah tidak bisa lagi membuat kurikulum secara sepihak. Tapi harus melibatkan representasi masyarakat dalam penyusunannya. Representasi terdiri atas mereka-mereka yang mewakili berbagai lapisan masyarkat dari berbagai disiplin keilmuan yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk mendapat dukungan dari masyarakat untuk membatu survival sekolah. Jadi dalam perencanaan kurikulum perlu dibuat semacam panitia pengembang kurikulum. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kurikulum mencakup perencanaan, pengawasan proses implementasi dan pengawasan pasca implementasi.

Peningkatan SDM dan fasilitas sekolah

Pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah mengharuskan tersedianya SDM yang siap dan mampu mengembangkan kurikulum desentralis. Mungkin sebagian sekolah mampu, tapi sebagian lain jelas tidak mampu. Kurikulum

---

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesialis perlu diadakan di sekolah-sekolah, yang bersama-sama komponen sekolah lainnya, terlibat penuh dalam pengembangan kurikulum.

Penutup

Santernya isu desentralisasi pendidikan mengharuskan pelaku pendidikan untuk mengadakan pemikiran ulang tentang operasionalisasi (lembaga) pendidikan. Penataan ulang seharusnya mencakup segala aspek pendidikan, termasuk kurikulum untuk disesuaikan dengan kondisi desentralisasi itu sendiri. Salah satu aspek dari desentralisasi adalah diberikannya wewenang bagi daerah atau sekolah untuk mengelola pendidikan secara otonomis dan dinamis.

Namun demikian upaya yang ditempuh untuk mengembangkan kurikulum sesuai desentralisasi pendidikan masih memerlukan waktu lama. Apalagi melihat kondisi sekolah yang belum siap sama sekali. Keempat *point* tentang pengembangan kurikulum di atas memberikan pemikiran awal bagi komunitas lembaga pendidikan untuk melakukan pengembangan kurikulum menuju desentralisasi pendidikan di masa yang akan datang. Bisa-tidaknya waallau a'lam.

References

Beare, H., Cladwell, B.J. & Millikan, R.H. (1989). *Creating an Excellent School: Some New Management Techniques*. London: Routledge.

Cotton, Kathleen (1992). *School-Based Management.* Northwest Regional Educational Laboratory: School Improvement Research Series, http://www.nwrel.org/scpd/sirs/7/topsyn6.html

Cuttance, P. (1991). *A Review of Effective Practice in Schools.* Victor Harbour.

Dimmock, Clive (1993). *School-Based Management and School Effectiveness*. London: Routledge.

Noble, Audrey J., Deemer, Sandra, & Davis, Betsy (1996). *School-Based Management.* Delaware Education Research & Development Center, http://www.rdc.udel.edu/pb9601.html

Oswald, Lori Jo (1995). *School-Based Management*, ERIC Digest 99 (July), http://eric.uoregon.edu/publications/digests/digest099.html

Peterson, David (1991). *School-Based Management and Student Performance*. ERIC Digest, 62. ED336845. http://ericae.net/edo/ED336845.htm

Vincent, Phil & Johnson, Debra (2000). *Implementing Site-Based Management to Support Student Achievement.* North Central Regional Educational Laboratory. http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/go/go700.htm

Wohlstetter, Priscilla and Mohrman, Susan Albers (1993). *School-Based Management: Strategies for Success*. Consortium for Policy Research in Education (CPRE), http://www.ed.gov/pubs/CPRE/fb2sbm.html

Wohlstetter, Priscilla, Van Kirk, Amy N., Robertson Peter J., & Mohrman, Susan A. (1997). *Organizing for Successful School-Based Management*.

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), http://www.ascd.org/readingroom/books/wohlstetter97book.html

**Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 17 Mei 2000.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id